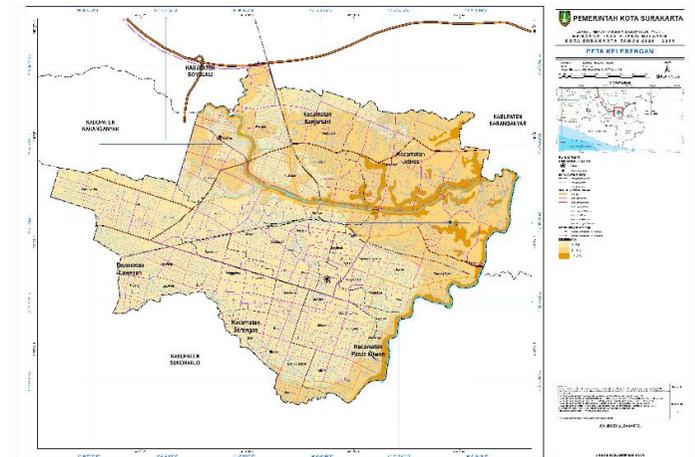


KOTA SURAKARTA

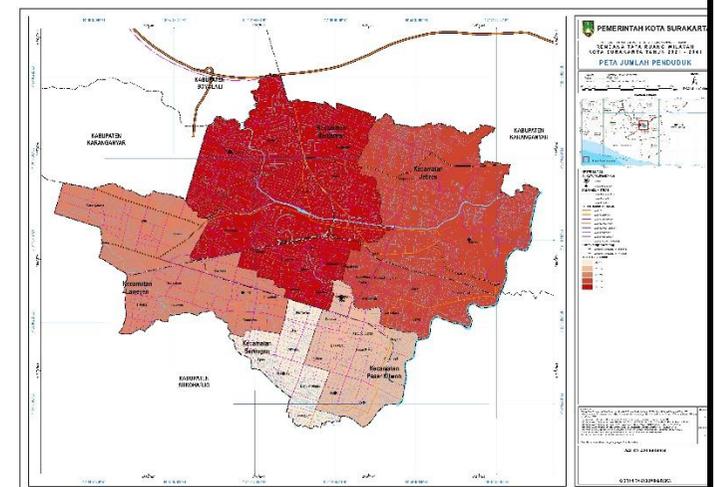
1. PROFIL KOTA

Organisasi teritorial, pembentukan kota Daerah Tk.II Kota SURAKARTA ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1947, berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1947 PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA
 Berdasarkan Undang – undang tersebut wilayah Kota SURAKARTA seluas 46.73 Km² meliputi wilayah 5 (lima) Kecamatan:

KECAMATAN	LUAS KECAMATAN Km2	%	JUMLAH KELURAHAN
Laweyan	9.13	19.54	11
Serengan	3.08	6.59	7
Pasar Kliwon	4.88	10.44	10
Jebres	14.38	30.77	11
Banjarsari	15.26	32.66	15
	46.73	100	54

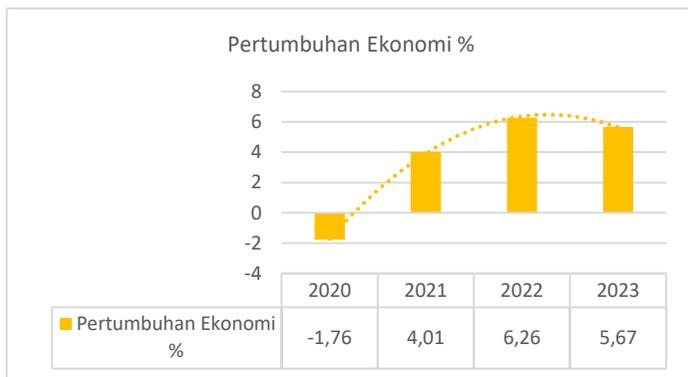


Populasi, Kota SURAKARTA, berdasarkan data sensus tahun 2023 sebanyak 526.870 jiwa rata – rata Pertumbuhan penduduk tahunan: 0.29%.
 Tingkat Kepadatan 11,275 jiwa/km², termasuk kedalam kategori sangat tinggi



Ekonomi, kondisi perekonomian kota SURAKARTA, terdiri dari:

- PDRB ADHK dari tahun 2020 – 2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 4.10%, kondisi PDRB ADHK kota SURAKARTA setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi ditahun 2023 dimana pertumbuhannya mencapai 5.03% PDRB ADHK Kota SURAKARTA ditahun terakhir (2023) sebesar Rp. 75,2 triliun
- Pertumbuhan Ekonomi Kota SURAKARTA dari tahun 2020-2023 menunjukan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 2.48 % Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 sebesar -1.76% yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi Kota SURAKARTA pada tahun 2021 sebesar 5.77%. sementara tahun 2022 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6.26 % (rata rata nasional tahun 2023 sebesar 5,04%)
- Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2020. - 2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 0.29% Pada tahun terakhir (tahun 2023) IPM Kota SURAKARTA adalah sebesar 83.54 termasuk kedalam kategori sangat tinggi.
- Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2020 - 2023 rata rata pertumbuhannya pertahunnya menurun sebesar -0.20%.
- Indeks Ketimpangan (Gini Rasio) Kota SURAKARTA dari tahun 2020 - 2023 Rata rata 0.38 termasuk kedalam kategori Ketimpangan rendah, berada dibawah sedikit rata rata nasional tahun 2023 sebesar 0,388.



Manajemen utilitas: Kota SURAKARTA Memiliki 4 Perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa perbankan, jasa layanan tempat wisata edukasi dan jasa perdagangan

Staf kota, Jumlah Pegawai Negeri adalah sebanyak 6.742 orang dengan komposisi jabatan struktural 607 Orang, jabatan fungsional umum 1.268 orang dan jabatan fungsional tertentu 3.016 Orang, sementara P3K 3.907Orang.

Uraian	PNS			Non PNS
	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PPPK
Pegawai yang tersedia (Eksisting)	607	3,016	1,268	1,851
Total				
%				
Kebutuhan pegawai Berdasarkan Anjab	629	8,150	7,652	
Total				
%				

Berdasarkan data diatas Berdasarkan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa jabatan masih memerlukan penambahan pegawai

Rencana Investasi Kota SURAKARTA berdasarkan Perda Penyertaan modal

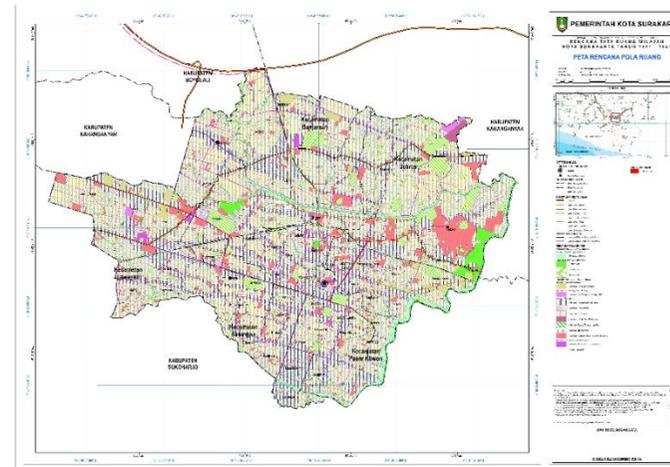
Nama Proyek	Total biaya	Sumber Pembiayaan
Revitalisasi Sentra IKM Meubel Gilingan	50 M	Kementerian Perindustrian
Revitalisasi Taman Balekambang Solo	154 M	Kementerian PUPR
Revitalisasi Lokananta	50 M	Kementerian BUMN
Pembangunan & Penataan Shelter PKL Manahan	15 M	

Isu strategis kota SURAKARTA:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal
2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh
3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh.
5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan Kota yang kondusif.

sasaran pembangunan RPJMD, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 6,01%
2. PDRB per kapita Rp. 120.490.619
3. Laju Inflasi 2,05%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8%
5. Rasio Gini nilai 19,76
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 84,94
7. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,92%



Revitalisasi Kebun Binatang Satwa Taru Jurug	35 M	APBN
Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Jl. Gatot Soebroto	31,6 M	Kementerian PUPR
Revitalisasi Solo Techno Park		APBN
Pembangunan Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo	920 M	Kementerian PUPR dan Kemenhub
Pembangunan Islamic Centre	20-30 M	Hibah UEA
Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo	300 M	Hibah UEA
Revitalisasi Pasar Jongke	142 M	APBN
Revitalisasi Pura Mangkunegaran	18 M	Kementerian PUPR
Pembangunan Museum of Culture of Technology	1 M	(Kemendikbudpar/ Pariwisata)
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).	400-500 M	KPBU
Penataan Kawasan Kumuh Semanggi	42,9 M	DAK INTEGRASI
Revitalisasi GOR Indoor Manahan	49 M	Hibah UEA
Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	35 M	Kementerian PUPR
Rumah Sakit Kardiologi di Solo	240 M	Hibah UEA

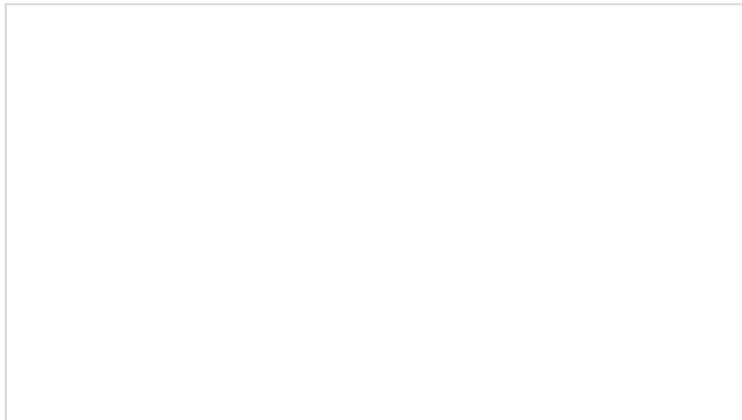
Permasalahan Pengelolaan keuangan daerah:

- Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan kota yang efektif dan efisien
- Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah yang masih mengandalkan dana transfer
- Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota dalam bidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,

8. SITUASI KEUANGAN¹

Tabel situasi keuangan

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
1	TOTAL PENDAPATAN	1.831.319.373.387.00	1.939.268.856.769.00	2.028.438.691.045.88	1.989.199.313.338.00	2.85%
	Belanja Operasi	1.349.814.240.936.00	1.489.971.451.913.00	1.700.583.774.120.00	1.724.205.594.329.00	8.64%
	Belanja Modal	250.969.805.187.00	341.100.953.660.00	380.832.881.832.00	380.390.555.685.00	15.82%
	Belanja Tak Terduga	37.881.680.298.00	35.423.942.731.00	6.406.739.648.00	2.773.369.018.00	-48.37%
	Belanja Transfer	999.500.000.00	0.00	500.000.000.00	0.00	
2	TOTAL BELANJA	1.639.665.226.421.00	1.866.496.348.304.00	2.088.323.395.600.00	2.107.369.519.032.00	8.88%
	Penerimaan Pembiayaan	108.310.864.321.26	291.894.539.353.00	314.315.289.323.00	254.430.584.768.88	52.71%
	Pengeluaran Pembiayaan	8.070.472.000.00	50.351.758.495.00	0.00	7.000.000.000.00	
3	TOTAL PEMBIAYAAN	100.240.392.321.26	241.542.780.858.00	314.315.289.323.00	247.430.584.768.88	49.94%



Kurs²: 1 US \$ = Rp. 16.100,00

Indeks inflasi³: indeks inflasi tahun 2020=1.44, 2021=2.58, 2022=7.03, 2023=2.67

• Rata rata Pendapatan Kota SURAKARTA dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp. 1,947,056,558,634.97,- atau pertumbuhan rata rata pertahun adalah sebesar 2.85%, ditahun terakhir (tahun 2023) Total Pendapatan kota SURAKARTA adalah sebesar Rp. 1,989,199,313,338,-

• Rata rata belanja Kota SURAKARTA dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp. 1,925,463,622,339.25,- atau pertumbuhan rata rata pertahun naik sebesar 8.88%. Posisi belanja saat ini (2023) adalah sebesar Rp 2,107,369,519,032,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp. 19,046,123,432.00,- atau meningkat sebesar 0.91%

• Komposisi belanja pada tahun 2023 (tahun terakhir) adalah

URAIAN	Realisasi Rp	%
Belanja Operasi	1,724,205,594,329.00	81.82%
Belanja Modal	380,390,555,685.00	18.05%
Belanja Tak Terduga	2,773,369,018.00	0.13%
Belanja Transfer	0.00	0.00%
JUMLAH BELANJA	2,107,369,519,032.00	100.00%

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja operasi (81,82%) memiliki proporsi paling tinggi dari total belanja daerah, perbanding antara belanja operasi dengan belanja modal adalah kurang lebih 4 : 1 (belanja modal hanya sebesar 18,05%) Proporsi belanja dalam APBD masih belum ideal jika menggunakan pemenuhan Mandat UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP 1 tahu 2024. tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

¹ Laporan ringkasan pada bagian situasi keuangan kota adalah penjelasan data tahun terakhir

² Kurs terhadap dollar merupakan kesepakatan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang merupakan titik tengah antara kurs jual dan kurs beli

³ Tingkat infalsi bersumber dari data badan pusat statistic yang ada di daerah

(rata rata selama 4 tahun)

9. ANALISIS HISTORIS: PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**PENDAPATAN**

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Rata Rata Pertumbuhan
	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah					
	Pendapatan Pajak Daerah	279,273,759,740.00	315,917,760,826.00	408,526,805,553.00	441,128,031,998.00	16.81%
	Pendapatan Retribusi Daerah	46,513,877,526.00	51,526,850,967.00	60,959,392,370.00	61,037,660,310.00	9.74%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,497,651,358.00	14,807,846,106.00	15,295,029,480.00	16,638,197,110.00	10.19%
	Lain-lain PAD yang sah	154,490,920,016.00	178,327,539,187.00	162,659,357,928.88	168,522,713,282.00	3.42%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	492,776,208,640.00	560,579,997,086.00	647,440,585,331.88	687,326,602,700.00	11.80%
	B. Pendapatan Transfer					
i	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
	Dana Bagi Hasil Pajak	56,910,515,801.00	47,440,533,679.00	51,911,028,241.00	60,925,255,285.00	
	Dana Bagi Sumber Daya Alam	1,780,895,008.00	10,324,838,505.00	3,054,973,339.00	1,849,608,831.00	3.38%
	Dana Alokasi Umum	794,665,771,000.00	781,825,148,000.00	776,550,616,614.00	809,121,510,137.00	123.30%
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	39,546,926,738.00	77,619,010,801.00	114,728,540,990.00	16,412,444,897.00	0.63%
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	152,219,337,625.00	139,703,977,404.00	210,662,919,916.00	209,778,847,677.00	19.46%
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,045,123,446,172.00	1,056,913,508,389.00	1,156,908,079,100.00	1,098,087,666,827.00	14.05%
ii	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					1.83%
	Dana Penyesuaian	61,860,673,000.00	78,136,398,000.00	30,558,815,000.00		
	Dana Insentif Daerah					-44.86%
	Dana Insentif Fiskal					
	Dana Otonomi Khusus					
	Dana Keistimewaan					
	Dana Desa					
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61,860,673,000.00	78,136,398,000.00	30,558,815,000.00	0.00	
iii	Transfer Pemerintah Antar Daerah					-44.86%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	132,073,766,816.00	167,475,868,180.00	165,478,211,614.00	171,423,732,811.00	
	Bantuan Keuangan	30,761,773,579.00	18,620,615,114.00	23,253,000,000.00		9.73%
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	162,835,540,395.00	186,096,483,294.00	188,731,211,614.00	171,423,732,811.00	-38.20%
	Total Pendapatan Transfer	1,269,819,659,567.00	1,321,146,389,683.00	1,376,198,105,714.00	1,269,511,399,638.00	2.18%
						0.15%
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
	Pendapatan Hibah	68,723,505,180.00	10,526,000,000.00	4,800,000,000.00	900,000,000.00	
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis					-73.44%
	Pendapatan Dana Darurat					
	Pendapatan Lainnya	0.00	47,016,470,000.00	0.00	31,461,311,000.00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68,723,505,180.00	57,542,470,000.00	4,800,000,000.00	32,361,311,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,831,319,373,387.00	1,939,268,856,769.00	2,028,438,691,045.88	1,989,199,313,338.00	155.42%



Pertumbuhan rata rata pendapatan kota SURAKARTA sebesar 2.85%
 Proposi Pendapatan rata rata transfer sebesar 0.15% pendapatan asli daerah rata rata sebesar 11.80% hal ini menunjukkan bahwa perbandingan pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer cukup significant bahwa kota surakarta melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah meskipun komposisi pendapatan transfer sangat tinggi pada kurun waktu 4 tahun.

Kesimpulan pendapatan daerah :

- Pendapatan asli daerah Kota SURAKARTA rata rata pertahun sebesar Rp 687,326,602,700,- atau proporsi sebesar 30.66% dari total pendapatan, hal ini menunjukkan Ketergantungan terhadap dana transfer cukup tinggi sektor terbesar pendapatan asli daerah dari sektor pendapatan pajak

BELANJA

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
1	Belanja Operasi	1.349.814.240,936.00	1.489.971.451,913.00	1.700.583.774,120.00	1.724.205.594,329.00	8.64%
2	Belanja Modal	250.969.805,187.00	341.100.953,660.00	380.832.881,832.00	380.390.555,685.00	15.82%
3	Belanja Tak Terduga	37.881.680,298.00	35.423.942,731.00	6.406.739,648.00	2.773.369,018.00	-48.37%
4	Belanja Transfer	999.500,000.00	0,00	500.000,000.00	0,00	
	TOTAL BELANJA	1.639.665.226,421.00	1.866.496.348,304.00	2.088.323.395,600.00	2.107.369.519,032.00	8.88%

Belanja daerah kota SURAKARTA rata rata pertumbuhan selama 4 tahun (2020 – 2023) sebesar 8,88%

Proporsi belanja terbesar yaitu pada belanja operasi, rata rata pertahun sebesar Rp. 1,925,463,622,339.25,- atau rata rata proporsi belanja operasi sebesar 81.82% dari total belanja

berdasarkan grafik diatas bahwa belanja operasi setiap tahunnya meningkat dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 89.77% sampai tahun 2023

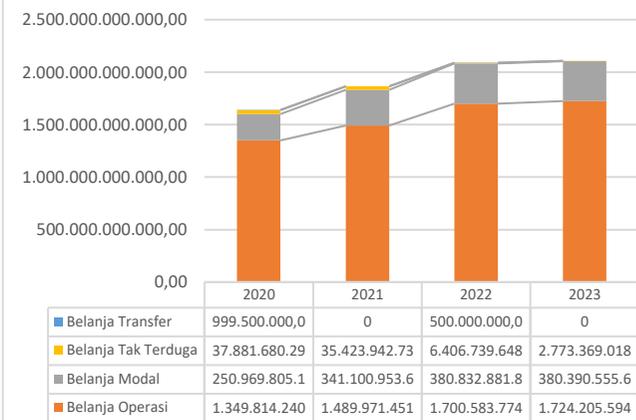
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Rp)	%
2020	1,886,698,244,826	1,639,665,226,421	-1,886,698,244,825	86.91%
2021	2,187,312,144,098	1,866,496,348,304	-2,187,312,144,097	85.33%
2022	2,459,974,822,361	2,088,323,395,600	-2,459,974,822,360	84.89%
2023	2,355,070,413,357	2,107,369,519,032	-2,355,070,413,356	89.48%
Rata Rata	2,222,263,906,161	1,925,463,622,339		86.65%

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dianalisa bahwa Belanja Daerah Kota SURAKARTA tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya selisih kurang (bersaldo negatif) yang menunjukkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran pada Pemerintah Kota SURAKARTA karena realisasi yang dicapai tidak melebihi anggaran. Hal ini menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai

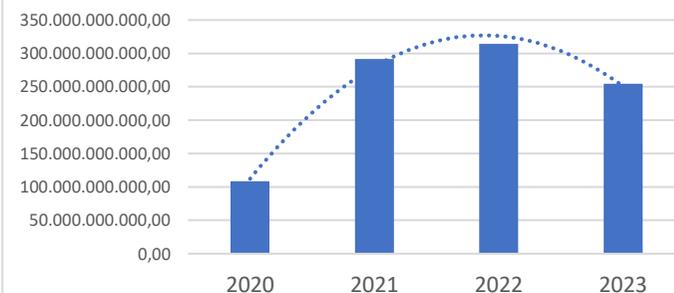
Pembiayaan Kota SURAKARTA

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Rata Rata Pertumbuhan
1	Penerimaan Pembiayaan					
	Penggunaan SILPA	105,310,864,321.26	291,894,539,353.00	314,315,289,323.00	254,430,584,768.88	55.27%
	Pencairan Dana Cadangan					
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat					
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain					
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank					
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank					
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah/Penyertaan Modal	3,000,000,000.00				
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya					
	Penerimaan Piutang Daerah					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108,310,864,321.26	291,894,539,353.00	314,315,289,323.00	254,430,584,768.88	52.71%
2	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7,626,000,000.00	18,500,000,000.00	0.00	7,000,000,000.00	
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat					
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerai	444,472,000.00				
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat					
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain					
	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya		31,851,758,495.00			
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank					
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank					

PROPORSI BELANJA KOTA SURAKARTA

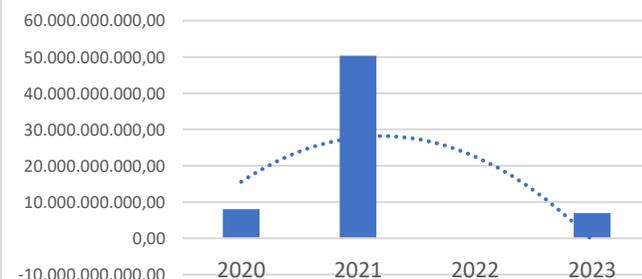


Penerimaan Pembiayaan



Penerimaan pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi kenaikan. Sampai 2022 dan terjadi penurunan pada tahun 2023. Kenaikan Penerimaan pembiayaan kontribusi terbesar berasal dari Penggunaan SILPA

Pengeluaran Pembiayaan



Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)						
Pemberian Pinjaman Daerah						
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya						
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.070,472,000.00	50,351,758,495.00	0.00	7,000,000,000.00		
PEMBIAYAAN NETTO	100,240,392,321.26	241,542,780,858.00	314,315,289,323.00	247,430,584,768.88		49.94%

Pengeluaran pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi kenaikan di tahun 2021 terkait dengan utang jangka pendek dan penyertaan modal pemerintah daerah dan tahun berikutnya terjadi penurunan yang signifikan.

Kesimpulan belanja daerah

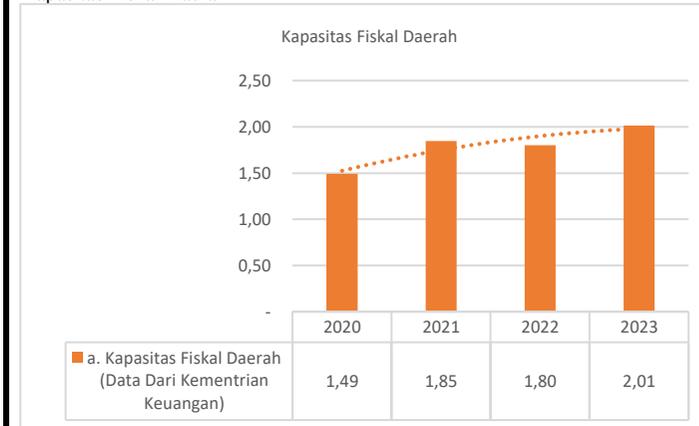
- Bahwa kecenderungan proporsi belanja daerah kota SURAKARTA lebih kepada belanja operasi sebesar > 75%. atau rata rata pertahun Rp 1,925,463,622,339.25,-. Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran masih terdapat kelemahan dimana proporsi belanja modal masih kecil.

10. ANALISIS RASIO

Analisis Rasio Kota SURAKARTA

No	RASIO	HASIL / NILAI					ANALISIS SEMENTARA
		2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	
1	OTONOMI FISKAL						
	a. Kapasitas Fiskal Daerah (Data Dari Kementerian Keuangan)	1.49	1.85	1.80	2.01	1.788	
		Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	b. Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal	26.91	28.91	31.92	34.55	30.57	Tingkat derajat otonomi fiskal sebesar 30,57 berarti Kota Surakarta masih bergantung kepada pemerintah pusat
	c. Tingkat Ketergantungan	69.34	68.13	67.85	63.82	67.28	Tingkat ketergantungan sebesar 67,28 berarti Kota Surakarta masih bergantung kepada pemerintah pusat
	d. Kapasitas Riil Pendanaan	48.80 %	50.12%	49.68 %	49.13%	49.43%	49,43% uang daerah bisa digunakan untuk mendanai pembangunan
2	KELAYAKAN KREDIT						

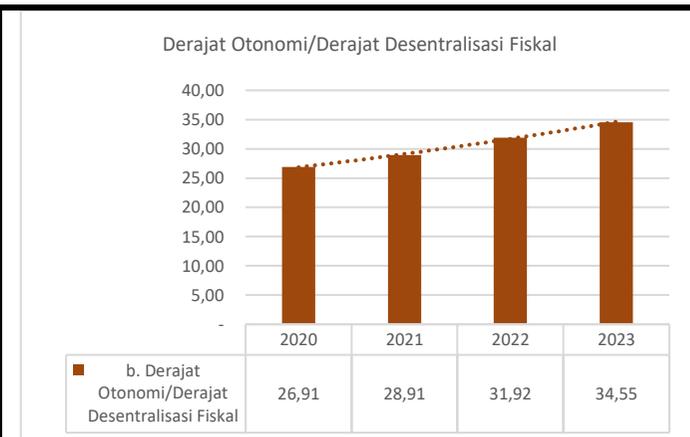
Kapasitas Fiskal Daerah



Kapasitas Fiskal berdasarkan data kementerian keuangan Kota SURAKARTA sebesar 1.79, termasuk kedalam kategori sangat tinggi, kategori tersebut didapat disebabkan oleh pendapatan daerah yang tinggi. Kontribusi terbesar pendapatan daerah Kota surakarta berasal dari dana transfer pusat, sementara pendapatan asli daerahnya rata rata hanya 11,80%.

Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal

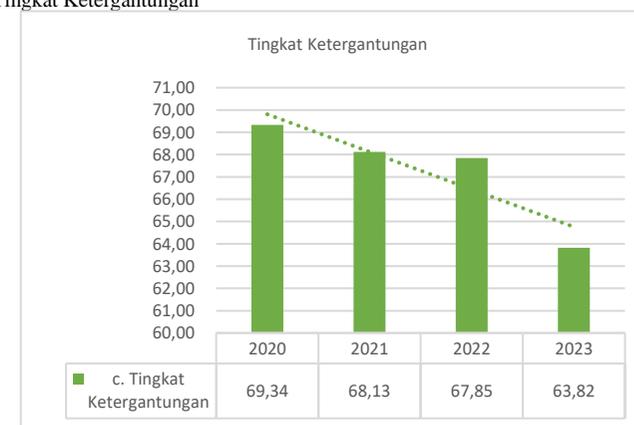
	a. Solvabilitas	149.8	266.6	277.8	239.6	233.46	Aset Pemda mempunyai kemampuan membayar hutang sebanyak 233,46 kali
	b. Quick Ratio	5.69	10.59	8.89	5.34	7.63	Pemda dapat membayar hutang dengan cepat. 7,63 kali dari jumlah hutang jangka pendek sekarang



Derajat Otonomi kota SURAKARTA rata rata sebesar 30.57 masih berada dalam kategori TINGGI dapat diartikan bahwa daerah tersebut masih terdapat ketergantungan terhadap dana pusat.

Tren kenaikan derajat otonomi semakin baik dalam kurun waktu 4 tahun terlihat adanya kenaikan dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 8.70%

Tingkat Ketergantungan



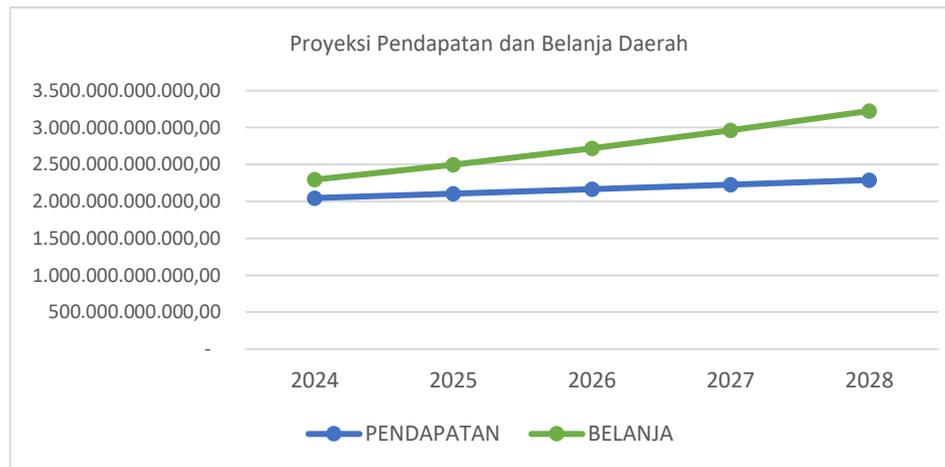
Tingkat Ketergantungan terhadap dana pusat kota SURAKARTA sebesar 67.28 % diatas ketentuan kondisi baik sebesar 40% , kecenderungan ketergantungan terhadap dana transfer selama kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) tetapi menunjukkan adanya penurunan

Dari hasil analisis rasio kota SURAKARTA:

Bahwa Kemampuan atau kapasitas fiskal dan derajat otonomi kota SURAKARTA masuk kedalam kategori sangat tinggi , hal tersebut dikarenakan adanya dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup besar tingkat ketergantungan terhadap dana pusat masih diatas 40% tetapi dari 4 tahun terakhir terjadi tren penurunan.

Proyeksi Keuangan

NO	URAIAN	Pertumbuhan	2024	2025	2026	2027	2028
1	PENDAPATAN	2.85%	2,045,891,493,768.13	2,104,199,401,340.52	2,164,169,084,278.73	2,225,847,903,180.67	2,289,284,568,421.32
2	BELANJA	8.88%	2,294,503,932,322.04	2,498,255,881,512.24	2,720,101,003,790.53	2,961,645,972,927.12	3,224,640,135,323.05



Berdasarkan grafik diatas Proyeksi pendapatan belanja kota SURAKARTA diproyeksikan sampai dengan tahun 2028, menunjukan belanja lebih tinggi dari pendapatan, Kondisi ini didapat dari tren pertumbuhan rata rata bahwa di kota SURAKARTA pertumbuhan rata rata belanja lebih tinggi dibanding dengan rata rata pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan hasil analisis perlu adanya prioritas dalam mengoptimalkan pendapatan serta melakukan optimalisasi dan efisiensi belanja

Dengan demikian maka perlu adanya perencanaan yang baik dari sektor keuangan melalui sasaran/program pembangunan jangka menengah daerah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD:

- Peningkatan Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan
- Peningkatan Pembangunan pada daerah prioritas
- Peningkatan Daya saing daerah dalam bidang ekonomi
- pemenuhan kedaulatan pangan
- Optimalisasi Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana
- Optimalisasi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal
- Peningkatan akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan

12. RENCANA PENINGKATAN KEUANGAN KOTA

1. Melakukan optimalisasi potensi pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
3. Optimalisasi peran Pihak ke 3 dalam pengembangan kota melalui dana investasi berdasarkan potensi daerah

*) Pada laporan ringkasan dilampirkan dokumen Perkada tentang penjabaran APBD per tahun (2020-2023) dalam mengisi form laporan ringkasan Pengembangan MFSa ini dapat berimprovisasi sesuai dengan kondisi daerah

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

NO	URAIAN PERMASALAHAN HASIL ANALISIS	KEBUTUHAN PELATIHAN			SASARAN	TUJUAN PENCAPAIAN	JENIS PELATIHAN	MATERI PELATIHAN	NARASUMBER AHLI
		YA	TIDAK	PEMBERIAN MODUL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Pendapatan								
1	Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan pendapatan		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan pendapatan daerah	-	Modul Dasar Pengelolaan Pendapatan Daerah	LMS
2	Rendahnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi	✓		✓	staf pengelola sektor pajak	Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor pajak	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Strategi Optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak	
3	Kurangnya inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi	✓		✓	staf pengelola sektor pelayanan pajak dan retribusi	Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Strategi Optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi	
II	Belanja								
1	Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan belanja		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan belanja daerah	-	Modul Dasar Pengelolaan belanja daerah	LMS
2	Adanya Gap antara perencanaan dengan realisasi dalam pengelolaan belanja	✓		✓	Staf pengelola perencanaan pembangunan	Meningkatkan Efektifitas dalam perencanaan	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran keuangan daerah	
3	Adanya Gap antara belanja operasi dengan belanja modal yang terlalu jauh	✓		✓	Staf Pengelola	Meningkatnya kemampuan staf dinas dalam pengelolaan belanja dan meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan kota	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Efektifitas Pengelolaan proporsi belanja daerah yang ideal	
III	Peran Pihak ke-3 dalam pengelolaan kota								
1	Kurangnya keterlibatan pihak ke-3 dalam percepatan Pembangunan kota		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatnya pertumbuhan ekonom daerah	Seminar	Strategi peningkatan investasi pihak ke-3 dalam Pembangunan kota	